

# JALINAN FEODALISME DAN KAPITALISME AGRARIS: TELAAH TERHADAP BUKU “KEBESARAN DAN TRAGEDI KOTA BANTEN”

Oleh: Sugeng P. Syahrie S.S  
Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

## Abstrak

*Studi tentang kemunduran Kesultanan Banten sudah dilakukan oleh banyak sejarawan dengan meletakkan faktor politik sebagai unit utama analisis. Berbeda dengan kecenderungan tersebut, buku Kebesaran dan Tragedi Kota Banten yang ditulis oleh Heriyanti Ongkodharma ini menampilkan politik hanya sebagai latar. Ongkodharma membeberkan fakta-fakta lain hasil dari kajian arkeologi ekologi ihwal pasang surut peranan Banten. Dari telaah tersebut, Ongkodharma menyimpulkan bahwa titik perhatian untuk menjelaskan kemunduran dan kemudian kehancuran kota Banten adalah pada pola-pola ekonomi dan sosial, bukan pada ekologis karena faktor ini lebih merupakan akibat. Bertolak dari karya Ongkodharma tersebut, artikel ini memberi penjelasan lebih jauh bahwa kapitalisme agraris (oleh golongan pribumi) tampaknya telah berlaku di Banten sejak didirikannya kesultanan hingga berakhirnya masa kekuasaan Sultan Ageng pada 1682. Tetapi, kapitalisme itu jalin-menjalin dengan praktik eksploitasi terhadap rakyat oleh kaum penguasa dan para tuan tanah yang disamakan oleh nilai-nilai tradisional dalam sistem feodal lokal khas kerajaan-kerajaan agraris Jawa yang masih berurat berakar—yang ternyata juga muncul dalam sebuah kerajaan pesisir seperti Banten.*

## Pendahuluan

Sejak Batavia mengambil alih peran Banten sebagai bandar niaga yang disegani pada penghujung abad ke-17, riwayat Banten tak ubahnya kisah Saijah dan Adinda yang memelas dalam novel *Max Havelaar* karya Multatuli. Kelas kapitalis niaga yang tadinya mulai tumbuh di Banten dengan sendirinya rontok oleh hadirnya monopoli serikat dagang VOC. Sejak itu yang terjadi adalah sebuah transformasi sosial terbesar dalam sejarah Banten: transisi dari masyarakat niaga pada zaman Kesultanan Banten menuju masyarakat buruh industri dewasa ini.

Studi tentang transformasi Banten ini sudah dilakukan oleh para peneliti lain, terutama sejarawan, dengan meletakkan faktor politik—terutama pertikaian internal keluarga kesultanan—sebagai unit utama analisis. Berbeda dengan kecenderungan ini, buku *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten* yang ditulis oleh Heriyanti Ongkodharma ini menampilkan politik hanya sebagai latar. Ongkodharma membeberkan fakta-fakta lain hasil dari kajian arkeologi ekologi ihwal pasang surut peranan Banten dalam perniagaan.

Dengan memanfaatkan ribuan bukti-bukti arkeologis (*material*

*culture*) —artefak-atefak biotik dan abiotik serta ekofak—Ongkodharma mengkaji pola-pola pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya lingkungan di Kesultanan Banten. Dalam analisisnya yang cermat, Ongkodharma menunjukkan bahwa pemerintah kesultanan tidak berfungsi sebagai lembaga yang mengkonservasi lingkungan. Politik ekonomi lada yang eksploitatif dan mengabaikan daya dukung dan keseimbangan lingkungan telah menyebabkan deteriorisasi lingkungan pedalaman maupun pesisir secara besar-besaran. Akibatnya, peranan Banten sebagai kota pelabuhan niaga berskala internasional terkikis bersama terjadinya deteriorasi lingkungan di kawasan ini (hlm. 203).

### **Bandar Niaga**

Asal-usul Banten sebagai sebuah kerajaan Islam agak unik. Taufik Abdullah dalam kata pengantar atas buku *Banten Dalam Pergumulan Sejarah* (2004) menjelaskan bahwa kerajaan ini tidak bermula dari tumbuh dan membesarnya sebuah kekuasaan lokal, tetapi muncul sebagai akibat dari ekspansi kekuasaan dari luar. Dalam usaha untuk meluaskan kekuasaan dan mengembangkan Islam, Sunan Gunung Jati—ulama-penguasa dari Cirebon, mendirikan Banten. Ternyata ini adalah sebuah keputusan politik yang sangat tepat karena pada awal abad xvi itu Malaka jatuh ke Portugis sehingga terjadi pemencaran pusat-pusat perdagangan Islam.

Di Jawa, abad xvi menyerupai sebuah tahap pokok dalam sejarah jaringan perniagaan. Selama enam dasawarsa kekuasaan agraris di pedalaman yang sampai saat itu unggul kemudian ditundukkan dan disingkirkan oleh kekuasaan niaga di pesisir. Sebuah

kebangkitan politik daerah pantai atas pedalaman. Kota-kota dagang baru pun bermunculan yang kemudian tumbuh menjadi pusat kekuasaan yang besar. Dalam situasi inilah—*the age of Islamic hegemony*—Banten secara pelan tapi pasti tumbuh menjadi *entrepot*—pelabuhan yang menerima barang impor, mengirim barang ekspor, dan mengekspor barang impor—yang terbesar di Pulau Jawa sekaligus menjadi kerajaan Islam yang besar.

Sepanjang kurun akhir abad xvi hingga awal abad xvii, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Denys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya* (2005, II: 55, 59), berkat meningkatnya perdagangan Eropa di daerah itu, tidak kurangnya kesaksian mengenai Banten, semuanya memberitakan segi kosmopolit kota itu dan mengemukakan bahwa pelabuhan itu termasuk yang terpenting di Jawa. Kota Banten mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1650-1682) yang merangsang perniagaan, melaksanakan pekerjaan besar di bidang kanalisasi dan pengairan, membangun istana baru, dan terutama tak henti-hentinya menyerang bangsa Belanda. Sesudah itu adalah masa-masa suram kemunduran Banten karena kesultanan diperintah oleh sultan-sultan yang pada dasarnya memihak pada kepentingan-kepentingan Belanda di Batavia.

Sejarah yang tersusun seperti ini telah menempatkan Banten sebagai sebuah kerajaan yang berwatak maritim—kegiatan dagang, kebudayaan dinamis, dan pandangan ke luar (*outward looking*). Watak yang dikontraskan dengan kerajaan agraris di pedalaman—keterikatan pada tanah, pertanian, sikap kultural yang konservatif, dan cenderung mempunyai

pandangan ke dalam (*inward looking*). Namun, apakah karena sejarahnya sebagai sebuah bandar niaga lantas menjadikan Banten benar-benar tidak teresapi oleh watak kerajaan agraris yang selama berabad-abad sebelumnya mendominasi kekuasaan di Pulau Jawa?

Ekonomi, yang menjadi urat nadi bagi kehidupan Kesultanan Banten, pada hakikatnya terbentuk dari jaringan yang berisi hubungan-hubungan sosial yang mengorganisasikan produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat prakapitalis seperti Banten, produksi ekonomi ditentukan oleh keinginan dan pilihan para pemilik kekuatan-kekuatan produksi, yakni sultan dan penguasa lain—bangsawan serta orang yang dekat dengan keluarga istana.

Wujud feodalisme khas kerajaan agraris yang ternyata juga muncul dalam sebuah kerajaan pesisir yang mendasarkan dirinya pada perniagaan, agaknya bukan sesuatu yang tanpa akar sejarah. Lombard (2005, III: 65) menulis bahwa ketika Islam datang, tentu membawa perubahan terhadap konsepsi raja yang demikian. Raja tidak lagi dianggap sebagai perwujudan dewa, melainkan wakil Allah di dunia (*kalifatullah*).

Namun, agaknya perubahan ini hanya pada permukaannya, dan 'lapis' luar keislaman itu ternyata tidak banyak mempengaruhi nilai-nilai lama. Konsep lama tentang raja sebagai poros dunia tetap bertahan dalam pikiran orang. Konsep kuno tentang kekuasaan raja di Asia Tenggara memandang kerajaan sebagai mikrokosmos dengan raja sebagai pelaku utama yang bertugas mempertahankan keserasian antara mikrokosmos dan makrokosmos (jagad raya). Fungsi raja juga disandangi ciri-ciri moral tertentu, antara lain

hubungan dasar antara "hamba dan tuan" (*kawula gusti*). Analisis ini memaksa kita untuk menengok kembali sejumlah konsep yang mungkin relevan untuk menjadi pijakan dalam menjawab pertanyaan di atas.

### **Ekonomi Dualistis**

Eksistensi Banten, sebagaimana dijelaskan oleh kalangan sejarawan, pada hakikatnya bertumpu pada ekonomi perdagangan komoditas lada. Tanpa hasil lada, Banten tidak banyak dikunjungi pedagang (hlm. 179). Kondisi serupa ini sangat disadari oleh penguasa Banten sehingga mereka memperbesar lahan untuk budidaya lada di samping tetap mempertahankan daerah penghasil lada di Lampung (hlm. 179). Kekuasaan Banten atas Lampung, daerah pemasok lada terbesar, sangat dominan, terbukti dari piagam Sukan 1695 Masehi (hlm. 168). Alhasil, "kultur lada" ini sangat berperan dalam perekonomian Banten sehingga menciptakan ketergantungan.

Ketergantungan terhadap lada itu mendorong munculnya 'keserakahan' membuka lahan di kawasan pedalaman untuk budi daya lada yang mengakibatkan penanaman padi menurun sehingga bahan pangan ini harus didatangkan dari luar daerah. Akibat selanjutnya adalah terciptanya ketergantungan bahan pangan yang membuat ketahanan pangan kesultanan menjadi sangat rawan. Pembudidayaan lada secara meluas di pedalaman telah menunjukkan bahwa lingkungan pedalaman adalah tulang punggung perekonomian kesultanan yang berpusat di pesisir (hlm. 201-202).

Realitas sosial ekonomi di Banten yang ditopang oleh kultur lada ini mungkin dapat dijelaskan, mula-mula, dengan menggunakan perspektif teori

yang dikemukakan oleh J.H. Boeke (1973), yaitu teori tentang sistem ekonomi dualistis di mana sektor kapitalis niaga terpisah dari sektor tradisional yang prakapitalis dan tidak dapat memberikan pengaruh yang sanggup mentransformasikannya. Sektor niaga yang kapitalis jelas berorientasi pada peningkatan produksi, bersikap rasional, mengutamakan pertimbangan ekonomi di atas pertimbangan sosial. Sebaliknya, sektor tradisional (pertanian) yang prakapitalis lebih berorientasi pada pemenuhan konsumsi, bersikap komunal dengan mengutamakan pertimbangan sosial di atas pertimbangan ekonomi.

Namun, sebagaimana argumen Clifford Geertz tentang pertanian di Jawa dalam karya provokatifnya, *Involusi Pertanian* (1983), dalam kasus Banten kedua sektor itu—pesisir dan pedalaman—sesungguhnya tidaklah terpisah, melainkan terikat oleh suatu hubungan. Dalam jangka pendek ini tampak sebagai sebuah hubungan saling menguntungkan (*symbiose mutualis*). Masyarakat Kesultanan Banten berhasil mengembangkan sumber daya lingkungan sehingga berhasil menjadi kota pelabuhan yang produktif, yang jejak-jejanya terekam dalam bentuk data arkeologi dan sumber tertulis (hlm 122).

Persoalannya, dinamika hubungan di antara dua kawasan ini dalam jangka panjang ternyata memiliki sifat tidak saling menguntungkan (*symbiose nonmutualis*). Sektor niaga yang kapitalis mengambil keuntungan dari sektor tradisional justru dengan cara memberi kesempatan kepada sektor tradisional untuk tetap hidup dan berkembang seperti semula dengan konsepsi bahwa kerja adalah pengabdian, penghambaan kepada sultan sebagai wakil Allah di dunia.

Ketidakmampuan sektor tradisional untuk berkembang merupakan akibat yang dideritanya melalui 'penghisapan' oleh sektor niaga yang kapitalis, seperti tampak dalam kutipan-kutipan berikut:

Pemanfaatan hutan secara langsung maupun tidak langsung agaknya sebagian besar hanya diperuntukkan bagi kelancaran kehidupan di kota pesisir saja. Sumber daya terbesar yang banyak diserap dari kawasan pedalaman telah mampu menjadikan Kota Banten berfungsi sebagai kota dagang internasional (hlm. 190).

Namun, pemanfaatan hutan di pedalaman sebagai lahan pertanian lada tampaknya tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol, baik oleh petani lada maupun oleh pihak lain. Kecenderungan untuk merambah hutan dilakukan semata-mata guna meningkatkan materi. Pihak pemerintah yang seharusnya tampil mengendalikan dan mengatur eksploitasi hutan, justru menjadi pihak penganjur aktivitas tersebut (hlm. 196-197).

Hilangnya kawasan hutan di pedalaman—oleh sebab pembukaan lahan untuk lada, penebangan pohon untuk bahan baku alat transportasi, bahan bangunan, dan sumber bahan bakar—mengakibatkan kandungan lumpur semakin tinggi di daerah hilir Sungai Cibanten. Akibat berikutnya adalah terjadinya bencana banjir di kota yang terletak di muara sungai dan pesisir (hlm. 151).

Sifat pantai Teluk Banten yang senantiasa menambah daratan juga telah menjadi ancaman lain bagi Kota Banten karena tidak diikuti oleh kemampuan teknologis dalam pengendaliannya. Makin lama muara sungai semakin dangkal, akibatnya kapal-kapal semakin sulit mendekati daratan (hlm. 183).

## Akar Penghisapan

Tulang punggung perekonomian Kesultanan Banten berupa pembudidayaan lada secara meluas di pedalaman mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa masyarakat Banten pada hakikatnya adalah masyarakat agraris, meskipun “sisi luar”-nya adalah aktivitas perniagaan yang berbasis di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, menjadi relevan untuk mengkajinya dari sudut agrarisme.

Salah satu ciri kuat masyarakat agraris adalah jurang yang luas dalam kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang terjadi antara kelas dominan dan subordinatnya. Tentu saja masyarakat agraris adalah masyarakat yang paling terstratifikasi di antara semua masyarakat praindustri. Selanjutnya, uraian tentang agrarisme di bawah ini merujuk pada Sanderson (1993: 111-130, 145-155, 169-187).

Pemerintah dalam masyarakat agraris adalah orang yang secara resmi menjadi pemimpin politik. Kelas penguasa terdiri dari mereka yang mempunyai tanah dan menerima keuntungan dari pemilikan tersebut. Kenyataannya, kelas penguasa dan pemerintah biasanya merupakan tuan tanah sekaligus penguasa politik, dan hal ini merupakan hubungan penting antara kedua segmen kehidupan elite tersebut. Sementara, populasi terbesar adalah petani yang mempunyai status ekonomi, politik, dan sosial yang lebih rendah—suatu kedudukan ditentukan secara turun-temurun.

Keadaan perekonomian mereka pada umumnya serba kekurangan, walaupun kadar “eksploitasi” terhadap mereka bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat agraris lainnya.

Negara agraris sangat terstratifikasi dan birokratis, terutama

di Asia. Dalam peradaban ini sedikit sekali dijumpai adanya insentif bagi usaha pribadi yang kita asosiasikan dengan kapitalisme karena negara begitu kuat sehingga usaha-usaha untuk menaikkan peranan usaha pribadi akan ditumpas sedini mungkin. Banyak masyarakat agraris disebut feodal yang ditandai oleh bentuk negara yang sangat tersentralisasi, birokratis, dan berkuasa secara intensif di mana rakyat sangat tersubordinasi terhadap suatu elite yang kecil. Dalam masyarakat yang seperti ini, manusia tidak mempunyai kedudukan yang sama. Terdapat kalangan atas dan kalangan bawah yang kedudukannya ditentukan oleh kelahirannya. Di sini birokrasi memainkan peran utama dalam pelembagaannya.

Bergerak di dalam lingkungan kekuasaan pusat itu, para pegawai kerajaan (*pamong praja*)—sebagaimana para pendahulunya dari zaman kuno—berperan memancarkan kekuasaan sampai ke propinsi yang jauh. Jadi pegawai ini adalah pancaran sang raja. Pada tingkat terbawah dari tata hierarki ini terdapat desa-desa. Jadi, sementara di ibukota raja menjaga keserasian antara kerajaannya dan kosmos, warga desa berusaha mencapai tujuan yang sama pada tingkat yang lebih sederhana.

Ciri khusus negara agraris adalah luasnya negara mengembangkan ideologi legitimasi yang sempurna yang digunakan untuk meyakinkan rakyat mengenai hak moral negara untuk memerintah. Semakin besar komitmen psikologis rakyat terhadap negara, semakin kurang kemungkinan pemberontakan terhadap negara. Ideologi legitimasi mempunyai berbagai bentuk, tetapi taktik yang paling umum bagi penguasa negara ialah membenarkan pemerintahan mereka

melaui agama sekaligus menandakan sanksi supranatural terhadap mereka yang menyimpang dari tertib sosial dalam masyarakat.

Salah satu segi keuntungan yang timbul dari penciptaan negara itu adalah redistribusi ekonomi, yakni negara sebagai organ yang memobilisasi sumber-sumber daya alam dan orang-orang untuk melakukan fungsi-fungsi produksi dan konsumsi yang penting. Daerah-daerah ekologis yang lebih didiversifikasi dikatakan sebagai dieksploitasi melalui organisasi setingkat negara. Melalui kemampuan memobilisasi sumber-sumber daya inilah negara agraris menciptakan kelas elite, segelintir orang, yang memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengakumulasi kapital. Menurut Wallerstein (dalam Sanderson, 1993), perkembangan awal kapitalisme pada periode praindustri adalah kapitalisme agraris di mana aktivitas ekonomi yang utama adalah pertanian kapitalis.

Dalam konteks Banten, kapitalisme agraris tampaknya berlaku sejak didirikannya kesultanan hingga berakhirnya masa kekuasaan Sultan Ageng pada 1682. Pada kurun waktu ini kesultanan yang berwatak agraris mampu membentuk organisasi perdagangan yang setara dengan ukuran internasional masa itu sekaligus melahirkan kelas kapitalis dari golongan pribumi. Perdagangan lada ini memberikan kekayaan serta kemakmuran di Banten. Kultur lada telah menjadikan sultan, para bangsawan, dan saudagar menjadi kaya, malaham tidak sedikit di antaranya yang berhasil memiliki rumah mewah, kapal, serta budak (hlm. 168).

Setelah itu, setelah perniagaan dikendalikan oleh VOC yang berbasis di Batavia, perdagangan Banten kemudian

beralih tangan ke dalam genggamannya kaum kapitalis niaga Eropa (Belanda) yang mendikte kaum kapitalis agraris pribumi. Merujuk Sanderson (1993: 171), kapitalisme niaga ini lahir pada abad xv seiring dengan kebangkitan kolonialisme Eropa. Perkembangan awalnya sangat bertalian dengan ekspansi aktivitas ekonomi dan kekuatan sosial yang dimiliki kaum urban. Akumulasi kapital mereka diperoleh karena (1) banyak pedagang pada saat itu, terutama pedagang luar negeri, mengandung kepentingan politis atau perampokan terselubung, dan (2) kelas pedagang, segera setelah membentuk suatu persekutuan dagang, dengan cepat memperoleh hak monopoli yang melindungi usahanya dari persaingan, dan berdagang hanya untuk keuntungannya sendiri dalam berhubungan dengan produsen atau konsumen.

### **Eksploitasi Terselubung**

Upaya mengaitkan ciri-ciri agrarisme di atas dengan eksistensi Kesultanan Banten sebagai sebuah bandar niaga besar mungkin membawa kita pada pemahaman yang paradoksal. Namun, rangkaian kutipan berikut yang diambil dari buku Ongkodharma, bisa menunjukkan bahwa paradoks itu ternyata menemukan kecocokan-kecocokan tertentu dengan data-data tentang Banten.

Bagi mereka yang tersangkut dalam aktivitas kultur lada, perluasan lahan agaknya sangat diutamakan agar hasil yang diperoleh semakin meningkat. Dalam hal ini peranan sultan dan penguasa lain—bangsawan serta orang yang dekat dengan keluarga istana—sangat besar karena mereka berhak menentukan harga

serta monopoli perdagangan lada tersebut (hlm. 177).

Golongan perantara inilah yang sebenarnya lebih mengecap keuntungan daripada petani lada itu sendiri. Dengan motivasi menarik keuntungan sebesar-besarnya, mereka tidak segan-segan menggunakan wewenang serta kedudukan merteka untuk mempengaruhi petani lada dengan cara menukarkan berbagai barang yang tidak diberi nilai sebagaimana layaknya. Kenyataan ini dibarengi dengan struktur birokrasi yang berlaku di Kesultanan Banten. Para petani lada agaknya mempunyai rasa pengabdian yang murni terhadap sultan dan para bangsawan. Pada masyarakat tradisional seperti Banten, tak mustahil para pejabat tersebut menggunakan wewenangnya secara berlebihan terhadap para petani sebagai wujud feodalisme. Hubungan antara pejabat yang membeli lada dan petani bukan semata-mata hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan yang disertai rasa berbakti dan berhamba yang lebih besar. Mereka umumnya mengerjakan lahan milik sultan dan kaum bangsawan (penguasa setempat), hidup sederhana, bekerja keras, namun hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil panen. Namun, rasa pengabdian yang besar kepada penguasa mengalahkan kebutuhan material mereka yang sebenarnya (hlm. 188).

Jelas di sini, produksi lada ditentukan oleh keinginan dan pilihan para pemilik kekuatan-kekuatan produksi, yakni sultan dan penguasa lain—bangsawan serta orang yang dekat dengan keluarga istana—yang pada hakikatnya adalah kaum kapitalis agraris. Mereka menyediakan barang-barang berharga dan jasa bagi para petani, tetapi mereka tidak memberikan akses yang tidak terbatas

atas sumber daya yang paling bernilai dalam masyarakat agraris, yakni tanah. Apakah rakyat juga dieksploitasi oleh para pemimpin mereka?

Tampaknya tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa para petani menerima keuntungan yang tidak rata sebagai hasil hubungan mereka dengan para tuan tanah. Mereka berbuat begitu karena ada di bawah tekanan tertentu, dan mereka terlibat dalam hubungan tersebut tidak secara sukarela atau karena tidak ada (atau mungkin sangat kurang) alternatif yang menarik. Oleh sebab itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa petani dieksploitasi oleh golongan elite penguasa.

Ini mungkin merupakan sebuah contoh tentang produk historis yang berakar pada kerajaan kerajaan agraris kuno di pedalaman Pulau Jawa yang mendominasi peradaban selama delapan abad (Abad VIII–XV). Praktik tersebut ini menjadi samar karena diselubungi tata nilai dan pranata-pranata budaya lokal yang hidup di masyarakat sehingga tidak tampak sebagai sebuah praktik penghisapan atau eksploitasi ekonomi. Dengan kata lain, telah terjadi sejenis proses eksploitasi terselubung terhadap rakyat yang dilegitimasi oleh nilai-nilai dan budaya yang pada dasarnya hanya merupakan kedok.

Dalam rumusan kaum Neomarksis, proses di mana hubungan sosial dan ekonomi disamarkan melalui berbagai selubung ideologi disebut mistifikasi (*mistification*). Dengan rumusan yang lebih gamblang, dapat dikayakan bahwa murahnya tenaga kerja rakyat dalam kenyataannya merupakan suatu faktor penting yang memungkinkan sekelompok manusia di kota untuk menikmati gaya hidup mewah (hlm. 168), dan bahwa ini bisa berlangsung

cukup lama (dua abad) karena didukung oleh nilai-nilai tradisional lokal, seperti sistem feodal lokal kerajaan-kerajaan agraris Jawa yang masih berurat berakar.

### **Kesimpulan**

Dari sisi sosiologis, sebuah pola sosiokultural yang adaptif mungkin mungkin tidak menguntungkan secara sama bagi semua individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Seringkali terjadi sebuah pola yang menguntungkan sebagian individu atau kelompok, namun merupakan pola yang maladaptif bagi sebagian yang lain. Memang, jika sebuah masyarakat semakin kompleks secara evolusioner, maka semakin sering ini terjadi. Kapitalisme industrial di Eropa pada masa awal, misalnya, adaptif bagi para pemilik perusahaan yang kaya, tetapi sangat maladaptif bagi ribuan pekerja pabrik yang mati karena kelaparan, kurang gizi, dan penyakit.

Jadi, dalam kasus kota Banten, apa yang semula tampak sebagai sebuah proses adaptif, kemudian secara paradoksal berakhir dengan maladaptif dalam jangka panjang. Dan jelaslah bahwa sebuah proses yang semula merupakan adaptasi—sebagai respon individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya—tetapi akhirnya melahirkan konsekuensi-konsekuensi maladaptif dalam jangka panjang. Yang menarik, maladaptasi ini tampaknya bukan terutama disebabkan oleh keputusan-keputusan yang bersifat ekologis—cara-cara tentang bagaimana interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan harus dikelola—karena hal ini lebih merupakan akibat.

Bila ditilik lebih cermat, akar persoalannya agaknya berada pada level struktur sosial masyarakat

Kesultanan Banten yang berwatak agraris. Persis seperti yang disimpulkan oleh Ongkodharma di paragraf akhir bukunya (hlm. 204)—dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Timothy Riordan dan Burch—bahwa untuk menjelaskan ihwal kemunduran dan kemudian kehancuran Kota Banten, titik perhatian mesti lebih difokuskan pada pola-pola ekonomi dan sosial.

Mestinya, untuk mencapai pembangunan masyarakat yang seutuhnya, yakni untuk membuat masyarakat tidak sekadar sebagai sarana tetapi juga tujuan pembangunan, strategi pembangunan yang ditempuh tidak boleh 'produksi sentris', tetapi harus diubah menjadi satu strategi yang lebih 'rakyat sentris'. Strategi ini akan memaksa golongan elite yang sudah sedemikian jauh memperoleh keuntungan dari strategi pembangunan 'produksi sentris' untuk melepaskan privilese yang sudah diperolehnya melalui kontrol atas faktor-faktor produksi. Pembangunan di Banten yang berorientasi produksi dan peningkatan produksi telah menimbulkan keserakahan—suatu sifat yang secara langsung atau tidak langsung dibenarkan oleh pembangunan yang menganut sistem kapitalis.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik. 2004. 'Pengantar', dalam Nina H. Lubis (penulis), *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES.
- Boeke, J. H. 1973. *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*. Jakarta: Bhartara.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan*



*Ekologi di Indonesia.*  
Terjemahan S. Supomo. Jakarta:  
Bhratara Karya.

Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa  
Silang Budaya* (Jilid II: Jaringan  
Asia dan Jilid III: Warisan  
Kerajaan-kerajaan Konsentris).  
Jakarta: Gramedia.

Ongkodharma, Heriyanti. 2006.  
*Kebesaran dan Tragedi Kota  
Banten*. Jakarta: Yayasan Kota-  
Kita

Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi  
Makro: Sebuah Telaah terhadap  
Realitas Sosial*. Terjemahan Farid  
Wajdi. Jakarta: Rajawali Pers.